

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana Desa di Desa Takarai Kecamatan Botin Leobebe Kabupaten Malaka) hal ini dapat dilihat berupa transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi secara transparan dan akurat serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa, kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut.

##### **1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa**

Ketersediaan informasi dokumen dalam pembangunan desa dapat dilihat bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pembangunan desa.

Penyediaan aksesibilitas dokumen dalam mengakses informasi dapat dilihat bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan untuk seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh untuk mengetahui aksesibilitas dokumen dalam mengakses informasi.

##### **2. Adanya Kejelasan dan Kelengkapan Informasi secara transparan dan akurat serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa**

Penyediaan informasi secara transparan oleh pemerintah desa dapat dilihat bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi diuntut harus dapat di jalankan dengan baik.

Pemerintah desa menyampaikan informasi yang akurat dan masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, hal ini dianggap penting agar masyarakat dapat langsung mengawasi kinerja dari pemerintah dalam mengelola dana desa, menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penyediaan informasi melalui papan informasi dan baliho bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat.

### **3. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Membuat laporan rincian anggaran serta dokumen-dokumen pendukung masyarakat perlu mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang anggaran desa, karna dengan adanya transparansi menjamin setiap masyarakat memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai oleh desa.

## **6.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dirangkumkan mengenai Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana Desa di Desa Takarai Kecamatan Botin Leobebe Kabupaten Malaka) yang diuraikan maka penulis dapat mengajukan berapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Takarai diharapkan untuk lebih transparan mengenai pembangunan Desa Takarai, agar bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain.
2. Masyarakat diharapkan lebih melibatkan diri dalam pengawasan dan pemantauan dari anggaran keuangan dana desa pada pembangunan Desa Takarai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2008). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*. [Universitas Diponegoro Semarang]. <http://eprints.undip.ac.id/16411/>
- Anggraini, R. D. (2013). Transparansi , Partisipasi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(2), 201–208. [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/1\\_Ristya\\_Transparansi\\_BOS\\_KMP\\_V1\\_N2\\_Mei\\_Ags\\_2013.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/1_Ristya_Transparansi_BOS_KMP_V1_N2_Mei_Ags_2013.pdf)
- Arishaputra, M. I. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. 28, 11.
- Arista, W. (2017). *No Title Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Effectiveness of Village Fund Allocation (ADD) and Poverty in South Sumatra. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Bambang, P. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135532>
- Brrington Moore. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Dumasari. (2014). *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Pustaka Pelajar. [https://digitallibrary.ump.ac.id/425/3/BUKU\\_AJAR\\_DUMASARI\\_I2014.pdf](https://digitallibrary.ump.ac.id/425/3/BUKU_AJAR_DUMASARI_I2014.pdf)
- Edi Suharto. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=z61YgUAAAAJ&citation\\_for\\_view=-z61YgUAAAAJ:u5HHmVD\\_uO8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=z61YgUAAAAJ&citation_for_view=-z61YgUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C)

- Hadari Martini.M Dan Hadari, N. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Madha University. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=462238>
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. umm.ac.id. <https://ummpress.umm.ac.id/katalog/detail/metodepenelitiankualitatif.html>
- Handika, R. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( MusrenbangDes) Di Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20798/contents>
- Hanni, A. (2017). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa* [Universitas Dharma Yogyakarta]. <https://docplayer.info/113413265-Skripsi-diajukan-untuk-memenuhi-salah-satu-syarat-memperoleh-gelar-sarjana-ekonomi-progam-studi-akuntansi-oleh-hanni-andini-nim.html>
- I Wayan Irvan M. (2017). *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoardjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)* [Universitas Lampung]. <https://fdokumen.com/document/penerapan-transparansi-pengelolaan-anggaran-tanpa-bab-pembahasanpdf-pendidikan.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 18-April-2 45 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Indrayani, & Damsar. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Kencana.
- Iqbal, H. M. (2002). *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. <https://onesearch.id/Record/IOS2893.JABAR000000000012645>
- Karim, A. G. (2006). *Persoalan Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. <https://onesearch.id/Record/IOS6.INLIS000000000001042>
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Pustaka Pelajar.

- Lexy, M. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Maryadi dkk. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi* (Nomor 59). BP-FKIP UMS.  
<https://fkip.ums.ac.id/>
- Masril, K. (2010). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan* [Universitas Tidore].  
[https://onesearch.id/Record/IOS1364.article-5817?widget=1&repository\\_id=1418](https://onesearch.id/Record/IOS1364.article-5817?widget=1&repository_id=1418)
- Miftahudin. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Panggugarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul* [Universitas Islam Indonesia].  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7967>
- Nyimas, A. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.  
[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/99900/mod\\_resource/content/1/Otonomi\\_Desa\\_dan\\_Efektifitas\\_Dana\\_Desa.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/99900/mod_resource/content/1/Otonomi_Desa_dan_Efektifitas_Dana_Desa.pdf)
- Nyoman, S. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No. 6 Tahun 2014 tentang desa*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
- Prabawa, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ilmu Pemerintah*, 3(1), 227–238. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1246>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 18.  
[http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/permendagri\\_no\\_20\\_TH\\_20181.pdf](http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/permendagri_no_20_TH_20181.pdf)
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN* (No. 60).  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana->

desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60\_2014.pdf

- Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pub. L. No. 6, Pemerintah RI 4 (2016). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/27878/PP Nomor 8 Tahun 2016.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/27878/PP%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020, Pub. L. No. 13, PDTT, Pemendes 32 (2020).
- Petunjuk Teknis Pendamping Desa, Pub. L. No. 40, 9 (2021). <http://gurudesas.com/index.php/2021/07/17/keputusan-menteri-desapembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-republik-indonesia-nomor-40-tahun-2021-tentang-petunjuk-teknis-pendampingan-masyarakat-desa/>
- Rika, A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/10197/>
- Satria, A. D. (2017). *Pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa* (Vol. 87, Nomor 1,2). Universitas Negeri Semarang.
- Siagian, S. P. (2007). *Administrasi Pembangunan . Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Gunung Agung. <https://onsearch.id/Author/Home?author=Sondang+P.+Siagian>
- Sri, M. (2019). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan* (Vol. 561, Nomor 3). Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV Alfa Beta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15364>
- Suharsimi, A. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- Wienda, D. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.